SITUASI AKHIR TAHUN 2003

DI PAPUA

REFLEKSI

NOVEMBER 2003

OLEH

THEO VAN DEN BROEK OFM

SEKRETARIAT KEADILAN & PERDAMAIAN (SKP)

KEUSKUPAN JAYAPURA

SITUASI PAPUA AKHIR TAHUN 2003

SEBUAH REFLEKSI

Mendekati ambang pintu tahun 2004, alangkah baiknya kita menoleh kembali pada apa saja yang terjadi di Papua selama tahun 2003 ini. Apa yang dapat dicatat sebagai peristiwa-peristiwa yang paling menentukan, dan arah mana perkembangan dari peristiwa-peristiwa itu? Dalam kata sambutan pada kesempatan perayaan peringatan tiga tahun kepemimpinan Bp. J.P.Solossa dan Bp. C.Karma, Mgr. Leo Laba Ladjar menyatakan, "Pimpinan Propinsi tidak hanya pusing menghadapi masyarakat yang mabuk demokrasi kacau balau. Mereka juga pusing tujuh keliling menghadapi kebijaksanaan Pemerintah Pusat yang (…) sering ternyata tidak bijaksana".[1] Ungkapan ini mendorong kami untuk menggali apa yang melatarbelakangi kesimpulan Bapak Uskup tadi.

Dalam merefleksikan perjalanan tahun 2003, ada dua perkembangan pokok yang paling menarik perhatian kami: [1] suasana pemekaran dan [2] suasana keamanan. Maka, dua pokok ini menjadi titik tolak uraian singkat kami sebagai refleksi akhir tahun ini.

1. SUASANA PEMEKARAN

Bagi siapa saja yang hidup di Papua selama tahun 2003 salah satu hal yang paling membekas dalam ingatannya adalah proses pemekaran propinsi yang diawali dengan terbitnya Inpres No. 1/2003. Terbitnya instruksi ini mengejutkan kita semua karena seakan-akan 'jatuh dari langit' begitu saja. Suatu instruksi yang memang tidak dinantikan, mengingat soal pemekaran (sekarang dan di masa mendatang) telah diatur rapi dalam Undang Otonomi Khusus di Papua No.21/2001. Maka, terbitnya Inpres No. 1 serta deklarasi propinsi baru oleh seorang 'calon gubernur yang baru', Bram Atururi, di bagian barat Propinsi Papua membuat banyak orang tidak mengerti lagi apa yang sebenarnya terjadi! Juga kejelasan dari Pemerintah Pusat yang sangat simpang siur tidak membantu untuk memahami kebijakan 'mendadak' ini.

Dari awal mula masyarakat luas memprotes niat dan kegiatan pembentukan propinsi baru di bagian barat Propinsi Papua, dan wakil-wakil pemerintahan

[1] Sambutan pada peringatan tiga tahun kepemimpinan Bpk. J.P. Solossa, M.Si dan drh Bpk. Constan Karma selaku Gubernur dan Wakil Gubernur serta peringatan dua tahun Otonomi Khusus Propinsi Papua, oleh Leo Laba Ladjar OFM, Uskup Keuskupan Jayapura, atas nama para Pemuka Agama dan Masyarakat, pada tanggal 23 November 2003.

(didukung oleh ahli-ahli hukum yang tidak perlu diragukan kredibilitasnya) menyatakan bahwa semuanya tidak sah. Maka Inpres No. 1 sebaiknya dicabut saja, dan proses 'judicial review' diprakarsai. Malahan dari kalangan kabinet ada suara yang mempersoalkan terbitnya Inpres No. 1 ini. Namun demikian, kita menyaksikan bahwa ternyata semuanya berjalan terus saja. Walau dinilai tidak sah, selama hampir satu tahun proses pembentukan propinsi berjalan, dan ternyata didukung oleh orang-orang kuat di Pemerintah Pusat[2], maka protes siapa saja tidak dihiraukan. Itulah kenyataan pahit.

Seakan-akan persoalan pemekaran di satu tempat belum cukup, muncul lagi upaya sejenis di bagian tengah Propinsi Papua, yakni di Timika. Sebenarnya pola persiapan pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah tidak beda jauh dengan pola yang sama di Irian Jaya Barat. Sambil mengambil isi Inpres No. 1/2003 sebagai legitimasi utama (sebenarnya yang menjadi dasar legitimasi adalah UU no.45/1999 tentang pemekaran wilayah Irja baik di tingkat propinsi maupun kabupaten karena Inpres hanyalah mempercepat pelaksanaannya), semuanya terjadi secara agak tersembunyi; ada yang diajak mendukung termasuk para anggota DPRD-D setempat, kecuali satu anggota, - yakni wakil Ketua - , dengan menandatangani suatu pernyataan dukungan yang disodorkan kepada mereka di rumah masing-masing. Sekalipun masyarakat setempat menyatakan tidak akan menerima pembentukan propinsi yang baru ini, Ketua DPRD Timika, Andreas Anggaibak, tetap nekad untuk memproklamasikan propinsi tersebut. Sementara waktu kebanyakan anggota DPR-D sudah mulai gelisah dan mulai menyembunyikan dukungannya. Bupati dan unsur Muspida lainnya ternyata bungkam seribu bahasa, atau bahkan membiarkannya. Siapa mendukung 'pejuang tunggal' itu, sampai dia berani melawan 'penolakan masyarakat'? Pertanyaan yang sama muncul juga sewaktu Bram Atururi memulai gerakannya di Manokwari! Jawabannya ternyata tidak mudah, walau ada indikasi kuat bahwa dalam kedua kasus Badan Intelijen Nasional (BIN) mengambil peranan besar[3].

Kita semua tahu bahwa proklamasi propinsi baru di Timika akhirnya menuntut cukup banyak korban karena pertikaian antara kelompok pro dan kontra (5 orang tewas), dan ada serangkaian pertikaian misteri yang sasarannya sejumlah tukang ojek (2 orang tewas). Tujuan apa pertikaian misteri ini? memicu konflik horisontal? Siapa bertanggungjawab atas kejadian berdarah ini? Dan Mengapa kejadian ini dibiarkan terjadi? Pertanyaan-pertanyaan demikian ada di benak para pengamat.

---

[2] Dukungan ini dengan jelas dinyatakan melalui pengangkatan resmi Bram Atururi sebagai pejabat Gubernur Propinsi Irian Jaya Barat pada tanggal 14 November 2003, bertempat di kantor Kementrian Dalam Negeri.

[3] Waktu memulai tugasnya di Manokwari (akhir Januari 2003) ternyata Bram Atururi dilengkapi dengan 'surat penugasan' yang ditandatangani oleh Hendropriyono, Kepala BIN.

Kekacauan yang menandai segala upaya pemekaran yang disebutkan di atas ini bukan saja menimbulkan pertanyaan yang tak terjawab, melainkan juga mempunyai sejumlah akibat yang sangat penting dan menentukan suasana masyarakat di Papua sekarang ini dan di masa mendatang.

[a] Salah satu akibat adalah **hilangnya kepercayaan masyarakat pada semua unsur pemerintahan**, baik di tingkat Kebupaten, Propinsi maupun Pusat. Sekali lagi masyarakat merasa tidak dihiraukan, bahkan ditipu karena ternyata apa yang sudah ditetapkan dalam UU yang resmi (Otsus) tidak diindahkan. Sekali lagi suatu janji yang tidak ditepati

.

[b] Maka, akibat lainnya yang sangat menentukan yakni **kemacetan implementasi Otonomi Khusus**. Kemacetan ini disebabkan karena kebijakan Pemerintah Pusat yang melanggar isi dari UU No. 21/2001 (Otsus) ini, dan yang sampai saat ini menolak untuk menyetujui pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai salah satu unsur kunci dalam proses implementasi Otsus Papua. Sulit menghindar dari kesan bahwa proses pemekaran untuk sebagian dimulai dengan sengaja guna menghalangi implementasi Otsus yang isinya menurut sejumlah tokoh di tingkat Pemerintah Pusat sudah memberikan peluang terlalu banyak kepada masyarakat di Papua untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka, sejumlah suara di tingkat Pemerintah Pusat ingin supaya isi Otsus diubah secara substansial, dan menurut informasi terakhir memang proses demikian sedang dijalankan. Ada kesan kuat: jiwa dan tujuan Otsus sebagaimana dirancang oleh para tokoh Papua, de facto sudah dinyatakan mati oleh Pemerintah Pusat.

Dampak pembatalan otsus akan serius karena:

1. Papua kehilangan peluang administrasi kenegaraan utk tangani konflik: komisi rekonsiliasi, komisi ham, pengadilan ham, kuota perempuan di MRP, pembentukan MRP dan kewenangannya.
2. Papua kehilangan alokasi dana yang kiranya dapat dimanfaatkan utk mengembangkan masyarakat terutama di wilayah pedalaman.
3. Papua dipecah dari dalam dan sebagian orang Papua dengan sadar melibatkan diri dalam pemecah belahan ini.

[c] Proses pemekaran juga membawaserta suatu **persaingan antar pejabat pemerintah di Papua**; ternyata ada banyak agenda berbeda yang sering berkaitan dengan ambisi pribadi orang. Akibatnya, tidak jelas lagi kekompakan kepemimpinan di Papua sehingga masyarakat merasa tidak memiliki lagi kepemimpinan. Perpecahan di tingkat kepemimpinan memang melumpuhkan efektifitas kerja pemerintah propinsi serta instansi-instansi terkait. Sesekali terdapat suara dari pribadi seorang pejabat, namun tidak ada kekuatan didalamnya yang mengikat sehingga mau didengar atau tidak;

sedangkan Pemerintah Pusat kurang peduli dan melanjutkan strateginya sendiri. Akhirnya sering terdengar dari pejabat di tingkat Propinsi Papua: “kami tunggu keputusan dari Pusat”. Seakan-akan tidak ada daya perjuangan lagi; seakan-akan pimpinan sipil merasa tidak ada wewenang lagi untuk mengatur Propinsi Papua; sementara waktu masyarakat merasa kehilangan gembalanya.

[d] Persaingan di tingkat pejabat (tinggi) juga mengakibatkan **perpecahan di tingkat masyarakat biasa.** Setiap kubu, yang pro dan yang kontra, mencari pendukungnya, dan ternyata selalu dapat, maka masyarakat sendiri akhirnya terpecah. Argumentasi utama dalam usaha merangkul masyarakat adalah ‘nanti akan ada uang banyak tersedia; sekarang uang itu dimakan habis di Jayapura’. Jelaslah dinamika mencari ‘pendudkung’ di masyarakat bukan berdasarkan suatu diskusi yang sehat, bukan berdasarkan informasi yang tepat dan kritis, melainkan berdasarkan emosi-emosi atau rasa kecewa pada masyarakat yang ternyata mudah mendorong mereka untuk menerima tawaran tersebut. Tentu cara ini dapat menyesatkan masyarakat biasa, dan di Timika akhirnya menuntut korban cukup banyak, terbukti membawa masyarakat ke dalam suatu konflik horisontal.

Pendek kata, suasana pemekaran yang serba semrawut mempunyai dampak yang luar biasa terhadap kehidupan bermasyarakat di Papua selama tahun ini. Secara umum dampaknya negatif karena lebih merusak daripada membangun. Memang tidak berlebihan kalau Uskup Jayapura menyatakan bahwa “masyarakat mabuk demokrasi kacau-balau” sedangkan pimpinan di Papua “pusing tujuh keliling menghadapi kebijakan Pemerintah Pusat”.

2. SUASANA KEAMANAN

Kenyataan kedua yang sangat menonjol selama tahun ini adalah munculnya kekerasan, khususnya di Wilayah Pegunungan Tengah. Pada tanggal 5 April terjadi pembobolan gudang senjata Kodim Wamena. Peristiwa itu ternyata menjadi titik awal suatu operasi militer yang menuntut banyak korban (orang yang mati, ditahan, dianiaya, yang mengungsi, orang yang menjadi takut, merasa diintimidasi, dsb). Memang jelas bahwa pembobolan gudang senjata tidak dapat diterima, dan patut ditindak dengan tegas setelah diadakan suatu investigasi yang kritis dan obyektif. Namun yang mengherankan ialah bahwa operasi militer langsung diluncurkankan seakan-akan sudah jelas siapa-siapa melakukan pembobolan itu, dan dimana mereka berada. Pola penyisiran yang diterapkan oleh TNI memang bukan pola yang asing lagi di Papua; pola yang sama dipakai sewaktu ada peristiwa di Abepura (2000), dan di Wasior (2001). Apalagi untuk menjalankan operasi militer ini pasukan yang sudah tersedia di tempat langsung dilengkapi dengan pasukan-pasukan dari luar Papua,

termasuk Kopassus yang – secara resmi – baru saja angkat kaki dari Papua pada bulan Februari 2003.

Operasi militer ini sempat dipertanyakan a.l. oleh baik sejumlah LSM, tokoh agama maupun tokoh adat. Yang menimbulkan pertanyaan adalah belum adanya investigasi mengenai peristiwa itu sendiri, namun kelompok sasaran operasi militer itu ternyata sudah ditetapkan secara geografis daripada berdasarkan suatu investigasi yang akurat untuk mengetahui siapa saja pelaku-pelaku pembobolan gudang senjata. Yang juga menimbulkan pertanyaan adalah mudahnya menuding OPM/TPN sebagai pelaku pencurian senjata, tanpa membedakan antara yang betul terlibat dan mereka yang tidak sehingga seluruh masyarakat di wilayah tertentu menjadi sasaran operasi militer, sampai menjadi korban, entah bersalah entah tidak.

Ungkapan pertanyaan-pertanyaan sebagaimana dirumuskan dalam suatu laporan terinci oleh Tim Gabungan Kemanusiaan – yang a.l. mengadakan penilitian atas permintaan para pemimpin agama di Papua – diremehkan dan dinilai tidak benar oleh pihak keamanan, sehingga operasi berjalan terus. Namun demikian laporan tersebut akhirnya dapat mendorong Komisi Nasional HAM untuk turun ke lapangan. Seusai kunjungannya (September 2003) Komisi Nasional HAM melaporkan hasil investigasinya kepada Kepala Negara (November 2003) dan telah memutuskan supaya 'kasus Wamena' perlu diperiksa kembali oleh Komnas HAM, karena menurut mereka memang terdapat indikasi kuat pelanggaran HAM oleh TNI dalam kasus ini.

Tentu operasi militer yang disebutkan di atas sudah cukup meresahkan masyarakat, bukan saja di sekitar Wamena, melainkan siapa saja yang ingin memperjuangkan secara aktif perwujudan Papua Tanah Damai serta penegakan hukum secara benar. Dalam keadaan demikian kita dikejutkan lagi oleh dua tindakan kekerasan yang luar biasa mengerikan: [1] di Paniai, Kecamatan Sugapa, Desa Ugimba (tgl. 3 November 2003) yang menimbulkan 6 korban, dan [2] di Jayawijaya, Kecamatan Bolakme, Desa Yalengga (tgl. 5 November 2003) yang menuntut korban 10 orang. Di Ugimba enam tukang kayu dibunuh atau dilukai sedemikian hingga tewas; terjadi begitu saja. Di Yalengga 10 orang ditembak mati karena diduga terlibat dalam kegiatan seperatis. Dalam kedua peristiwa kita berhadapan dengan aksi pembunuhan secara langsung; di Ugimba oleh sekelompok yang tidak diketahui identitasnya; di Yalengga oleh TNI. Pemberitaan dalam Cepos, termasuk penerbitan foto-foto, mengenai kedua peristiwa, lebih-lebih dari Yalengga, sangat mengerikan, bahkan Jakarta Post (tgl. 7 Nov.2003) dalam "opini"-nya di bawah judul "Hidup adalah sesuatu yang murah di Indonesia" tidak bisa tahan kemarahannya pada TNI sewaktu melihat foto dalam Indonesia Pos,

yang menunjukkan empat prajurit “memperlakukan mayat seorang pejuang OPM ibarat seekor binatang yang diburu dan ditembak mati”.

Apa yang dirasakan masyarakat di Papua saat berhadapan dengan peristiwa-peristiwa kekerasan yang begitu meresahkan? Tentu masyarakat merasa terpukul dan tidak aman. Muncul perasaan kurang dilindungi dan juga sikap “diam” saja. Juga sikap mendukung operasi militer dari pihak para pejabat sipil tidak membuat masyarakat merasa lebih tenang. Perlahan-lahan masyarakat biasa mulai mengalami bahwa keamanannya tidak terjamin lagi dan perasaan sedemikian terus bertambah karena sejumlah kejadian lain yang turut mewarnai suasana kemasyarakatan dewasa ini.

[a] Kejadian-kejadian lain yang kami maksudkan adalah seperti **peresmian Front Pembela Merah Putih (FPMP)** di Timika (*Radar Timika*, tgl. 12 November 2003). Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa organisasi ini dimotori oleh Eurico Gutteres, seorang tokoh militia nasionalis Indonesia yang kegiatannya meninggalkan banyak bekas kekerasan maut di Timor Leste beberapa tahun lalu. Masyarakat di Timika coba memprotes pembentukan FPMP ini namun ternyata tidak berhasil. Bertempat di kantor Koramil Timika, badan pengurus FPMP Cabang Timika ditetapkan dan diumumkan melalui Radar Timika. Apalagi dalam suasana pasca-‘perang antar saudara’ yang baru lalu dengan proklamasi propinsi baru, pembentukan FPMP sempat meresahkan masyarakat karena tidak jelas kegiatan apa yang akan dikembangkan oleh organisasi ini, namun jelas masyarakat tahu keganasan gaya nasionalisme Eurico Gutteres.

[b] Ada kesan bahwa ruang kebebasan ungkapan pendapat makin dibatasi. Dalam waktu relatif singkat diterbitkan pada tanggal 10 November 2003 suatu instruksi gabungan Gubernur, Pangdam, Kapolda dan Kepala Kejaksaan yang **melarang segala acara perayaan berhubungan dengan 10/11 November** (pembunuhan Theys) **dan 1 Desember** (hari sejarah Papua) **dilarang.** Yang sangat mengherankan (dan membuat orang betul merasa ‘pusing tujuh keliling’) larangan ini **ditanggapi oleh Mendagri,** Hari Sabarno sbb.: “Sekarang bukan zamannya larang melarang, namun keinginan sebagian rakyat Papua itu jangan diangkat berlebihan” (Harian Suara Pembaruan, 11 November 2003). Maka, secara singkat dikatakan: **boleh saja, asal tidak berlebihan**. Hal ini disusuli pada tanggal 11 November dengan ancaman oleh Kepala Kejaksaan Negeri di Papua untuk **menarik buku mengenai Theys keluar dari peredaran**. Buku ini (ditulis oleh Dr. Benny Giay) yang baru diluncurkan pada tanggal 25 Oktober 2003 mengisahkan tentang kejadian menyedihkan pada tanggal 10/11 November 2001. Buku mau dilarang karena [1] dapat meresahkan masyarakat, dan [2] dapat memupuk persepsi yang tidak baik terhadap pemerintah. Satu dua hari

kemudian (13 November) **papan peringatan Theys di Entrop dirobohkan** oleh pihak keamanan karena teks yang ada pada papan itu dinilai "memiliki tulisan-tulisan yang berkonotasi tidak baik" (Cepos 14 Nov.2003).

[c] Sementara waktu pihak kepolisian terus bicara mengenai suatu **"operasi ketupat"** yang dijalankan selama masa ramadhan (dan selanjutnya menjelang Natal dengan nama 'operasi lilin'), berupa kegiatan sweeping dan peningkatan pengawasan. Sasarannya tidak pernah diperjelaskan, sementara berita Kapolda bahwa selama Idul Fitri akan mengerahkan 4000 personil (Cepos 18 November) demi keamanan memberikan kesan seakan-akan Jayapura dalam keadaan eksplosif. Kebijakan yang sama ternyata direncanakan untuk kota-kota lain pula, apalagi menjelang tanggal 1 Desember 2003. Di Sorong pasukan Kostrad berkemah di depan Gereja GKI "Maranatha" guna mengawasi keamanan kota. Suasana 'kecurigaan' ini dipupuk lagi dengan berita dari tingkat pusat dimana Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Ryamizard Ryacudu meminta semua pihak untuk mewaspadai situasi keamanan di Papua, karena pihak asing mulai 'bermain-main'. "Kita harus waspada, karena mereka akan 'mengobok-obok' Papua dan kemudian melepaskannya" (Media Indonesia, 27 November 2003). Yang tidak kalah pentingnya tambahan oleh anggota Komisi I DPR Yasril Ananta Baharuddin yang mengungkapkan (Media Indonesia 17 November 2003) bahwa modus intervensi yang dilakukan pihak asing belakangan ini biasanya melalui lembaga-lembaga penelitian atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), yang melakukan kegiatan dengan dalih demokrasi, hak asasi manusia, dan kelestarian lingkungan. Dengan adanya pernyataan semacam itu dapat diramalkan bahwa hampir segala ungkapan kritis oleh lembaga-lembaga dimaksud akan dinilai oleh pihak tertentu sebagai 'upaya mendukung gerakan separatis'. Tentu ruang gerak bagi segala instansi yang menjalankan suatu peranan sipil demi menjaga secara kritis perkembangan di Papua makin hari makin akan ditutup.

3. MENUJU KEMBALI KEPADA KEBISUAN / KEJENUHAN

Menoleh kembali pada perkembangan selama 5 tahun terakhir ini kami dapat membedakan antara sejumlah tahap perkembangan selama kurun waktu lima tahun itu. Gambarannya l.k. sebagai berikut:

[a] **tahap kebangkitan:** pada tahun 1998 masyarakat Papua mulai bangkit dari kebisuan selama puluhan tahun. Terdorong oleh perkembangan-perkembangan di tingkat nasional masyarakat di Papua pun mulai turut menuntut suatu **reformasi.** Aspirasi-aspirasi yang lama terpendam dalam hati

banyak warga mulai terungkap dan berpuncak pada pertemuan dengan Presiden Habibie bulan Februari 1999.

[b] **tahap pengorganisasian intern:** setelah bertemu dengan Presiden Habibie masyarakat Papua mulai bergabung dalam suatu gerakan massal yang melalui dua pertemuan akbar dilengkapi dengan suatu struktur keorganisasian. Kedua pertemuan masing-masing berlangsung di Sentani: Musyawarah Besar bulan Februari 2000 dan di Jayapura: Kongres Papua II**,** bulan Mei 2000. Melalui kedua pertemuan itu gerakan aspiratif masyarakat mulai terorganisir dan mulai merintis suatu hubungan dialog dengan Pemerintah Pusat (Presiden Abdurrahman Wahid). Ternyata Presiden cukup terbuka akan dialog yang diminta oleh wakil-wakil masyarakat Papua.

[c] **tahap konfrontasi antara dua pendekatan:** setelah Kongres Papua II (Juni 2000) muncul suara-suara di pusat pemerintah yang meminta supaya gerakan di Papua ditiadakan, kalau perlu dengan memakai kekerasan. Kejadian-kejadian berdarah muncul di Abepura, Wamena, Merauke (Desember 2000). Pen**dekatan kekerasan** memuncak dalam pembunuhan Theys Eluay (November 2001). Sementara waktu Presiden Adurrahman Wahid dilengser dan diganti dengan Presiden Megawati Sukarnoputri (Juli 2001).

Pendekatan kekerasan ini dijawab dengan upaya memajukan **pendekatan damai**. Walau masyarakat sangat terpukul karena sejumlah peristiwa berdarah, masyarakat masih dapat diajak oleh sejumlah lembaga yang mereka percaya untuk menjalankan perjuangannya dengan damai menuju suatu dialog yang terbuka. Dalam kerangka ini dua pokok dikembangkan secara sangat aktif: [1] memberikan isi kepada semboyan “Papua Tanah Damai”, dan [2] merumuskan pegangan Otonomi Khusus bagi Papua. Pengembangan konsep “Papua Tanah Damai” dikejar melalui sejumlah pertemuan penting (a.l. Konperensi Zona Damai – September 2002 -, dan Lokakarya “Membangun Budaya Damai” – November 2002) dan khususnya terungkap secara publik melalui “Perarakan Damai” (21 September 2002) di Jayapura yang menyatukan seluruh Muspida bersama para pemimpin keagamaan serta organisasi sipil lainnya. Sementara rancangan Otonomi Khusus untuk Papua dirampungkan oleh para tokoh intelektual Papua dan akhirnya disahkan oleh Pemerintah Pusat pada bulan Oktober 2001. Isi Otsus ini sebenarnya dapat dinilai sebagai “sarana praktis” demi perwujudan cita-cita Papua Tanah Damai.

[d] **tahap perpecahan:** selama tahun 2001-2002 sudah terasa adanya perbedaan persepsi, lebih-lebih menyangkut tepatnya Otsus sebagai sarana penyelesaian konflik. Perbedaan pendapat terdapat di segala kalangan dan

cenderung mulai menghasilkan adanya 'kubu-pro' dan 'kubu-kontra'. Kenyataan demikian sangat menghambat kemajuan dalam implementasi awal UU Otsus, apalagi untuk menjaga tepatnya proses implementasi itu. Suasana menjadi lebih kacau lagi karena beberapa peristiwa berdarah: di Wasior (2001), pembunuhan Theys (2001), Timika (2002), dan Wutung (2002) dan muncullah isyu-isyu yang menjadi benih ketakutan: isyu mengenai pembentukan Barisan Merah Putih, peranan TBO (tenaga bantuan operasional), kegiatan Laskar Jihad, orang bertopeng, Operasi Matoa. Tidak mengherankan bahwa masyarakat mulai makin bingung dan merasa resah. Dalam keresahan ini muncul Inpres No. 1/2003 yang tiba-tiba mengobarkan suasana dan memaksa orang sekali lagi untuk mengambil sikap; hasilnya: proses pepecahan di masyarakat meningkat. Ditambah lagi dengan tindakan kekerasan yang mulai mewarnai suasana kemasyarakatan sejak April 2003, yang turut melumpuhkan masyarakat. Kemudian tidak ada satu suara pun yang betul dapat mewakili (atau menyatukan) masyarakat Papua secara menyeluruh: pejabat pemerintah sendiri pecah, PDP tidak dapat bersuara karena terjepit antara penolakan Otsus dan penolakan Inpres No. 1. Yang masih bisa bersuara adalah lembaga-lembaga keagamaan, namun suara mereka pun kecil. Hasilnya: implementasi Otsus macet total, berarti hilangnya suatu sarana praktis untuk menjawab sejumlah masalah di Papua; suatu pemerintahan propinsi yang terpecah, perwakilan rakyat yang kurang berinisiatif; suatu masyarakat yang tidak tahu lagi dan makin takut; yang penting adalah: masyarakat Papua, termasuk para pejabatnya pelahan-lahan merasa jenuh dengan segala hal yang terjadi. Rasa pasrah, karena toh tidak didengar, mulai kelihatan. Muncul apatisme dan frustrasi di masyarakat, sehingga mudah dapat diajak terlibat dalam tindak/pilihan kekerasan. Apakah kekerasan di Paniai baru ini adalah tanda peringatan dalam hal ini? Tetapi juga di tempat biasa seperti di kota-kota kekerasan, kriminalitas meningkat.

Di tengah kelumpuhan total ini semua pihak – dan jelas bukan pihak asing versi KSAD - yang ingin "bermain-main" di Papua dapat leluasa bergerak yang luarbiasa. Memang benar, kita hidup dalam suatu demokrasi yang makin kacau-balau.

4. CATATAN AKHIR

Berefleksi atas semua perkembangan sebagaimana diuraikan di atas ini, tidaklah berlebihan jika Uskup Leo Laba Ladjar OFM berkesimpulan kita semua pusing tujuh keliling. Keprihatinan para pemimpin agama terhadap segala perkembangan itu terungkap dalam catatannya:

> "kami, pemuka-pemuka agama, merasa diri seperti penonton sepak bola. Kami duduk di tribun dan menyaksikan bagaimana para pemain bermain di lapangan … itu. Ada yang lari dengan membawa bola sendiri dan tidak peduli dengan rekan mainnya. Ada yang hanya jalan-jalan santai, malah sampai jauh ke luar lapangan. Ada yang menyepak wasit, menendang pelatihnya dan memaksanya untuk menyerahkan semua dana agar bisa dihabiskan segera di sudut-sudut lapangan.

> Kami melihat dari tribun. Kami berteriak mengingatkan agar apa yang salah diperbaiki dan aturan main diindahkan. Kadang-kadang kami hilang kesabaran dan ingin terjun ke lapangan untuk ikut bermain. Tetapi tidak bisa. Itu bukan tugas kami. Tugas kami ialah berteriak, entah untuk memberikan dukungan atau pun teguran dan sumpah serapah. Tetapi, kami merasa, suara kami seperti suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Suara itu hilang ditelan desiran pasir dan tidak didengarkan, karena para pemain memang sedang menikmati bagaimana rasanya mabuk demokrasi kacau balau, mabuk kuasa, mabuk proyek dan uang haram".

Uraian konkret demikian sangat jelas, dan menunjukkan bahwa Papua telah berkembang kearah suatu suasana di mana bukan aturan main (tata hukum dan pengindahan hak-hak dasar setiap warga masyarakat) mengambil peranan utama, melainkan kepentingan pribadi orang, kepentingan kelompok atau aliran tertentu yang menentukan apa yang terjadi dan akan terjadi. Apakah betul kita sudah beralih dari 'negara hukum' ke 'negara kepentingan'? Siapa tidak sedih dan khawatir melihat perkembangan demikian?

Jayapura, 28 November 2003

Theo van den Broek ofm
Direktur SKP Jayapura